

**KINERJA ANGGARAN BELANJA PROGRAM PROTEKSI  
TANAMAN PERKEBUNAN PADA MASA *COVID-19* DI  
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

**Bagus Pangestu  
NIM. 07011281722091**

**Konsentrasi Keuangan Negara dan Fiskal**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**KINERJA ANGGARAN BELANJA PROGRAM PROTEKSI  
TANAMAN PERKEBUNAN PADA MASA *COVID-19* DI DINAS  
PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh  
Gelar Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

**Oleh:**

**BAGUS PANGESTU**

**07011281722091**

**Pembimbing I**

**Dr. Lili Erina, M.Si.**

**NIP. 196612301992032001**



**10 - 06 - 2021**

**Pembimbing II**

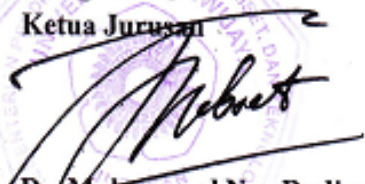
**Dwi Mirani, S.IP., M.Si.**

**NIP. 198106082008122002**



**05 - 09 - 2022**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan**



**Dr. Muhammad Nur Budiwanto, S.Sos., MPA**

**NIP. 196911101994011001**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**KINERJA ANGGARAN BELANJA PROGRAM PROTEKSI  
TANAMAN PERKEBUNAN PADA MASA *COVID-19* DI DINAS  
PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

Oleh :  
**Bagus Pangestu**  
**07011281722091**

**Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 14 Juli 2022**

Pembimbing :

1. Dr. Lili Erina, M.Si  
NIP. 196612301992032001



2. Dwi Mirani, S.IP., M.Si  
NIP. 198106082008122002



Penguji :

1. Drs. Gatot Budiarto, MS  
NIP. 195806091984031002



2. Annada Nasyaya, S.I.P., M.Si  
NIP. 198809062019032016



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si  
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik,



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
NIP. 196911101994011001

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bagus Pangestu  
NIM : 07011281722091  
Tempat dan Tanggal Lahir : Solok, 1 September 1998  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik / Keungan Negara dan Fiskal  
Judul Skripsi : Kinerja Anggaran Belanja Program Proteksi Tanaman Perkebunan Pada Masa Covid-19 Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, serta pertanyaan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah hasil pengamatan penelitian ini, pengelolaan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 13 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



Bagus Pangestu

NIM. 07011281722091

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

***“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”***

**(Q.S. Al-Baqarah: 286)**

**“Belajarliah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan serta rendah hatilah  
pada orang yang kamu belajar darinya.”**

**(HR. Thabrani)**

**Skripsi Ini Saya Persembakan Kepada :**

- 1. Kedua Orang Tuan Saya, Bapak Sunarto dan Ibu Yuli Astuti**
- 2. Saudara-Saudara Saya, Yudhi Sudharsono, Indah Widhianingrum, dan Dian Aprimayeni**
- 3. Adik dan Keponakan Saya, Faqih dan Mirza**
- 4. Seluruh Dosen dan Pegawai Fisip Unsri**
- 5. Rekan Seperjuangan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2017**
- 6. Almamater Kebanggaan Saya.**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Kinerja Anggaran Belanja Program Proteksi Tanaman Perkebunan Pada Masa *Covid-19* Di Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020. Permasalahan yang terjadi dilatarbelakangi oleh adanya perubahan anggaran pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan konsep pengukuran kinerja anggaran menurut Mohamad Mahsun untuk mengetahui kinerja anggaran dengan menghitung selisih anggaran. metode penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang digunakan diperoleh secara langsung dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan berupa Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan APBD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja anggaran belanja program proteksi tanaman perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan berada pada kategori kinerja yang baik. Dibuktikan dengan perhitungan kinerja anggaran yang menghasilkan selisih anggaran yang tidak melebihi alokasi anggaran atau *underspending* dan capaian kinerja yang memenuhi target. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan anggaran yang terjadi tidak berdampak besar pada kinerja anggaran belanja program proteksi tanaman perkebunan tahun 2020. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan harus mempertahankan kinerja anggaran dan meningkatkan serta memaksimalkan kinerja anggaran program.

**Kata Kunci : Kinerja, Anggaran, Belanja, Covid-19, Program, Proteksi, Tanaman, Perkebunan, Dinas, Perkebunan, Provinsi, Sumatera, Selatan**

**Pembimbing I**



**Dr. Lili Erina, M.Si.**  
NIP 196612301992032001


**Pembimbing II**



**Dwi Mirani, S.IP., M.Si.**  
NIP 198106082008122002

**Palembang, Juli 2022**

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya**



**Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP 196911101994011001

## ABSTRACT

*This research was conducted to know the Budget Performance of the Plantation Plant Protection Program During the Covid-19 of the South Sumatra Province Plantation Office in 2020. The problems that occurred were motivated by a change in the budget at the South Sumatra Province Plantation Office in 2020. This research was analyzed using The concept of measuring budget performance according to Mohamad Mahsun is to determine budget performance by calculating the budget difference. The research method is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The data used was obtained directly from the Plantation Office of South Sumatra Province in the form of a Physical and Financial Progress Report on the Regional Budget of the Plantation Service of South Sumatra Province. The results of this study indicate that the budget performance of the plantation plant protection program of the Plantation Service of South Sumatra Province is in the good performance category. It is proven by the calculation of budget performance which results in a budget difference that does not exceed the budget allocation or underspending and achievement of performance that meets the target. Based on these results, it can be concluded that the budget changes that occurred did not have a major impact on the budget performance of the plantation crop protection program in 2020. The Plantation Service of the South Sumatra Province must maintain budget performance and improve and maximize program budget performance.*

**Keywords : Performance, Budget, Expenditure, Covid-19, Program, Protection, Plants, Plantation, Service, Plantation, Province, Sumatra, South**

Advisor I



**Dr. Lili Erina, M.Si.**  
NIP 196612301992032001

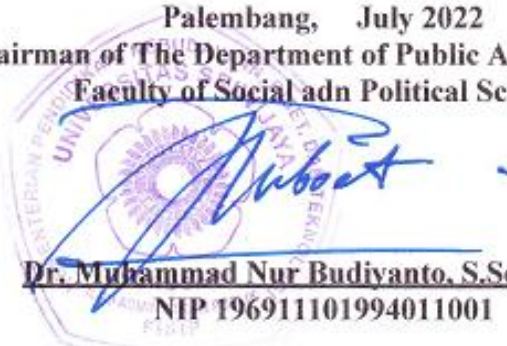
Advisor II



**Dwi Mirani, S.IP., M.Si.**  
NIP 198106082008122002

Palembang, July 2022

Chairman of The Department of Public Administration  
Faculty of Social and Political Science



**Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP 196911101994011001

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberi rahmat, karunia dan ridho-nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dimana skripsi ini merupakan tugas dan kewajiban dalam melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Publik.

Penyusunan skripsi ini selalu diberikan kelancaran dan pertolongan dari Allah SWT dan dukungan dari kedua orang tua tercinta, kakak dan adik tersayang serta keluarga yang tiada henti medoakan, memberikan motivasi, kasih sayang, dan selalu memberi semangat kepada penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, kelancaran, kesabaran, dan kekuatan dalam setiap langkah untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Sunarto dan Ibu Yuli Astuti, saudara saya Yudhi Sudharsono, Indah Widhianingrum, dan Dian Aprimayeni, serta adik dan keponakan saya Faqih dan Mirza.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
6. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku dosen Pembimbing Akademik.
7. Ibu Dr. Lili Erina, M.Si selaku Pembimbing I yang selalu sabar dalam membimbing, memberikan ilmu, solusi terbaik, serta kritik dan saran yang sangat membangun.
8. Ibu Dwi Mirani, S.IP., M.Si selaku Pembimbing II yang selalu sabar dalam membimbing, memberikan ilmu, solusi terbaik, serta kritik dan saran yang sangat membangun.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
10. Seluruh Staf dan Karyawan Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Ir. Agus Darwa, M.Si selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
12. Ibu Marcellia Nonita, SE selaku Bendahara Sub Bagian Keuangan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
13. Seluruh Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan yang telah membantu dan memperlancar dalam mengurus administrasi.
14. Teman-teman, sahabat, dan rekan seperjuangan Ilmu Administrasi Publik 2017 Kampus Indralaya

Semoga segala bantuan dan keikhlasan bapak/ibu dan teman-teman sekalian dibalas oleh Allah SWT. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun apabila terjadi kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, Juli 2022

Bagus Pangestu  
NIM. 07011281722091

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis .....	9
2. Manfaat Praktis.....	9
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	 <b>10</b>
A. Landasan Teori.....	10
1. Kinerja Anggaran .....	10
a. Pengertian Kinerja Anggaran.....	10
b. Pengukuran Kinerja.....	11
c. Cara Pengukuran Kinerja Anggaran .....	12
2. Pengukuran Kinerja Berbasis Analisis Anggaran .....	12
3. Anggaran.....	14
a. Pengertian Anggaran.....	14
b. Anggaran Sektor Publik .....	14
c. Fungsi Anggaran Sektor Publik.....	15
d. Jenis Anggaran Sektor Publik .....	16
4. Program Proteksi Tanaman Perkebunan.....	17
5. <i>Coronavirus Disease</i> .....	18
B. Penelitian Terdahulu.....	18
C. Kerangka Pemikiran .....	25
 <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	 <b>26</b>
A. Desain Penelitian.....	26
B. Definisi Konsep.....	26
C. Fokus Penelitian .....	28
D. Jenis dan Sumber Data .....	28
E. Informan Penelitian .....	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Keabsahan Data Penelitian .....	31
H. Teknik Analisis Data .....	32

I. Sistematika Penulisan .....	33
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	35
1. Sejarah Singkat Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan .....	35
2. Letak Geografis Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.....	37
3. Visi dan Misi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.....	38
4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan .....	39
5. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.....	40
6. Tugas dan Fungsi Bidang Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan .....	42
7. Sumber Daya Manusia Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan .....	50
B. Analisis dan Pembahasan Kinerja Anggaran Belanja Program Proteksi Tanaman Perkebunan Pada Masa <i>Covid-19</i> Di Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan .....	52
1. Analisis Kinerja Anggaran Belanja Program Proteksi Tanaman Perkebunan Pada Masa <i>Covid-19</i> Di Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.....	53
2. Analisis Capaian Target Kinerja Anggaran Belanja Program Proteksi Tanaman Perkebunan Pada Masa Covid-19 Di Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 .....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perubahan Anggaran Program Proteksi Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 .....	6
2. Realisasi Anggaran Program Proteksi Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 .....	8
3. Penelitian Terdahulu .....	19
4. Fokus Penelitian.....	28
5. Rekapitulasi Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 .....	51
6. Perubahan dan Realisasi Anggaran Belanja Program Proteksi Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 .....	57
7. Perhitungan Analisis Kinerja Anggaran Pada Program Proteksi Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 .....	60
8. Perubahan Anggaran Belanja Program Proteksi Tanaman Perkebunan Pada Kegiatan Pengawasan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Penugasan Tahun 2020 .....	67
9. Realisasi Keuangan dan Fisik APBD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Program Proteksi Tanaman Perkebunan .....	69
10. Matriks Hasil Temuan dan Pembahasan .....	79

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Rumus Kinerja Anggaran.....	14
2. Kerangka Pemikiran.....	25
3. Gedung Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.....	37
4. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.....	41
5. Diagram Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020	51
6. Rumus Kinerja Anggaran.....	54
7. Dokumen Kontrak Jasa Konsultasi Perencanaan Rehab Laboratorium Produksi UPTD BPTP.....	72
8. Surat Perintah Kerja Jasa Konsultasi Perencanaan Rehab Laboratorium Produksi UPTD BPTP.....	72
9. Ringkasan Kontrak Jasa Konsultasi Perencanaan Rehab Laboratorium Produksi UPTD BPTP.....	73
10. Gambar Perencanaan Rehab Laboratorium Produksi UPTD BPTP .....	73
11. Dokumen Kontrak Jasa Konsultasi Perencanaan Rehab Gedung Kantor UPTD BPTP.....	75
12. Ringkasan Kontrak Jasa Konsultasi Perencanaan Rehab Gedung Kantor UPTD BPTP.....	75
13. Surat Perintah Kerja Jasa Konsultasi Perencanaan Rehab Gedung Kantor UPTD BPTP.....	76
14. Gambar Perencanaan Rehab Gedung Kantor UPTD BPTP .....	76

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Pedoman Wawancara
2. Pedoman Observasi
3. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
4. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I
5. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II
6. Lembar Revisi Seminar Proposal Pembimbing I
7. Lembar Revisi Seminar Proposal Pembimbing II
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
10. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020
11. Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan APBD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020
12. Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dinas Perkebunan Tahun 2020
13. Surat Izin Penelitian
14. Surat Balasan dari Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan
15. Surat Balasan dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
16. Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*
17. Dokumentasi Penelitian

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari kata dasar kerja yang memiliki arti hasil kerja atau prestasi. Menurut Mahsun (2013:25) kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategi suatu organisasi. Kinerja anggaran dapat digunakan untuk menilai/mengukur pengelolaan anggaran apakah sudah baik atau tidak. Secara etimologi, kata “anggaran” yang disusul kata “kinerja” mempunyai arti bahwasanya penganggaran kinerja atau hasil kerja senantiasa menghubungkan pengalokasian anggaran dengan ketercapaian hasil kerja pada setiap elemen alokasi dana yang dianggarkan. Anggaran dijadikan sebagai alat untuk perencanaan, komunikasi, koordinasi, pengawasan, dan pengambilan. Menurut PMK RI No, 214/PMK.02/2017 mengenai Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pasal 1 ayat 6, kinerja anggaran berarti pencapaian hasil kerja terkait pemakaian anggaran lembaga atau kementerian yang tercantum pada dokumen anggaran.

Kinerja anggaran sering kali berkonsep pada anggaran berbasis kinerja yang mana merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan. Pengukuran kinerja jadi suatu bagian penting untuk organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja diperlukan oleh pemerintah daerah untuk melihat pertanggungjawaban pada pelayanan masyarakat. Pengukuran kinerja anggaran digunakan untuk menilai pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif. Menurut Jumingan

(2006:239) pengukuran kinerja keuangan memiliki dua tujuan. Pertama pengukuran kinerja keuangan digunakan untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan. Kedua untuk mengetahui kemampuan dalam mendayagunakan aset.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 mengenai Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pasal 39 mengungkapkan nilai hasil kerja anggaran tingkatan lembaga ataupun kementerian, satuan kerja/kegiatan, eselon I/program diklasifikasikan pada kategori yaitu:

- a. Nilai kinerja anggaran melebihi 80% hingga 90% berkategori yaitu baik
- b. Nilai kinerja anggaran melebihi 90% berkategori sangat baik
- c. Nilai kinerja anggaran melebihi 50% hingga 60% berkategori kurang
- d. Nilai kinerja anggaran melebihi 60% hingga 80% berkategori cukup
- e. Nilai kinerja anggaran melebihi hingga 50% berkategori sangat kurang.

Hasil kinerja anggaran dapat kita klasifikasikan dengan menggunakan pengklasifikasian nilai hasil kinerja anggaran diatas. Dengan begitu kita dapat melihat apakah kinerja anggaran sudah berjalan baik atau buruk. Baik atau buruk suatu kinerja anggaran perlu dilakukannya evaluasi. Evaluasi kinerja anggaran berkaitan dengan evaluasi hasil kerja ataupun kinerja suatu organisasi publik yang mempunyai beragam macam program. Program tersebut nanti akan dibagi kembali jadi berbagai aktivitas yang ingin dilakukan oleh organisasi publik. Organisasi publik merupakan yang bertujuan untuk menghasilkan pelayanan kepada masyarakat, tanpa membedakan status dan kedudukannya. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu organisasi publik yang berada di pemerintahan daerah.

Namun pada tahun 2020 terjadi pandemi *Coronavirus Disease (Covid-19)* hampir di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Pandemi *covid-19* menyebabkan terhambatnya sistem keuangan dan ekonomi yang ada di Indonesia. Sebagai contohnya yaitu terjadinya penurunan berbagai macam kegiatan perekonomian, turunnya pendapatan negara, dan kenaikan belanja negara serta pembiayaan. Sebagai dampak dari pandemi *covid-19*, pemerintah melakukan efisiensi dan perubahan anggaran. Pemerintah mengambil tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki perekonomian nasional dan perbaikan kesehatan. Salah satu caranya yaitu dengan memfokuskan belanja untuk kesehatan, jaringan pengaman sosial, dan penyembuhan perekonomian dalam aktivitas usaha dan masyarakat terdampak *covid-19*.

Pemerintah membuat berbagai macam kebijakan dan tindakan-tindakan kepada pemerintah daerah dalam rangka percepatan penanganan *covid-19*. Dimulai dengan *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran, penggunaan belanja tak terduga, penyesuaian pendapatan daerah hingga rasionalisasi belanja. Junaidi dkk (2020:150) mengatakan bahwa arahan mengenai *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk pertama kali dituliskan pada keputusannya peraturan perundang-undangan yang dapat dibaca pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*.

Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 memfokuskan pada usaha realokasi anggaran yang sebelumnya dianggarkan untuk selain penanganan *covid-19* yang sekarang digantikan untuk mempercepat penanganan *covid-19*. Dengan konsep untuk kepentingan masyarakat, maka *refocussing* anggaran merupakan suatu hal yang keharusan. *Refocussing* adalah tindakan menunda atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak dalam koridor prioritas, sedangkan realokasi diartikan sebagai perubahan alokasi

anggaran. Dalam hal ini prioritas terpenting adalah mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan *covid-19* dengan mengacu pada protokol penanganan *covid-19* di Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan *covid-19* yang ditetapkan oleh Satgas *covid-19*.

*Refocussing* dan realokasi anggaran yang dilakukan mengakibatkan terjadinya perubahan anggaran. Ketika perubahan anggaran terjadi, maka yang harus dilakukan adalah penyesuaian ulang atau penganggaran ulang. Perubahan atau revisi terhadap anggaran yang dilaksanakan pada tahun berjalan merupakan fenomena yang biasa dilakukan dalam penganggaran publik atau pemerintah termasuk di Indonesia (Junita,2015:366). Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 19 ayat 1 dan 2 berbunyi dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Perubahan anggaran yang terjadi menyebabkan organisasi publik dituntut untuk menganggarkan kembali anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga SKPD harus membuat Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD).

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia untuk menjadikan percepatan penanganan *covid-19* sebagai prioritas utama, maka perlu dilakukan perubahan anggaran. Jadi, sebagai salah satu instansi yang mengalami perubahan anggaran, Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan melakukan perubahan anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 dan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 900/0840/BPKAD/2020 tentang efisiensi belanja langsung dalam rangka percepatan

penanganan *Coronavirus Disease (covid-19)* serta surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-247/MK.07/2020 tentang penghentian proses pengadaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2020. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran membantu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mengawasi serta membangun, dan mengembangkan sektor perkebunan di wilayah provinsi Sumatera Selatan. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas, dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi demi terciptanya pekerjaan yang efektif dan efisien maka Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan terbagi menjadi beberapa sub bagian, bidang, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan merupakan pelaksana kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perkebunan. Penyelenggaraan pemerintah daerah berhubungan dengan adanya penggunaan dan pemanfaatan anggaran serta pendapatan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang disusun dan ditetapkan setiap tahun yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan penyelenggaraan daerah.. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan memiliki 11 program dalam anggaran belanja langsung bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan semua anggaran belanja program mengalami pengurangan anggaran akibat pandemi *covid-19*.

Rincian perubahan anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan terdapat dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD). Salah satu perubahan anggaran yang terjadi yaitu pada anggaran belanja program proteksi tanaman perkebunan. Program proteksi tanaman perkebunan adalah salah satu program

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya untuk melindungi tanaman dari ancaman maupun gangguan yang bisa memberi kerusakan, kerugian ataupun mengganggu kelangsungan kehidupan tanaman. Perlindungan tanaman mempunyai peranan vital untuk menentukan kesuksesan budidaya tanaman. Program perlindungan tanaman peran vital untuk menentukan kesuksesan membudidayakan tanaman. Program proteksi atau perlindungan tanaman perkebunan di Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 memiliki beberapa macam kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat rincian mengenai perubahan anggaran program yang dijumpai pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020..

**Tabel 1. Perubahan Anggaran Program Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020**

No.	Nama Program	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	Persen
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.503.887.900	1.995.264.500	(508.623.400)	(20,31)
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	140.000.000	35.000.000	(105.000.000)	(75,00)
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100.000.000	88.450.000	(11.550.000)	(11,55)
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000	87.224.000	(12.776.000)	(12,78)
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	150.000.000	60.000.000	(90.000.000)	(60,00)

Lanjutan Tabel 1

6.	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan	374.000.000	174.000.000	(200.000.000)	(53,48)
7.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan	100.000.000	50.000.000	(50.000.000)	(50,00)
8.	Program Pengembangan Perbenihan Perkebunan	100.000.000	76.250.000	(23.750.000)	(23,75)
9.	Program Proteksi Tanaman Perkebunan	3.666.522.702	118.000.000	(3.548.522.702)	(96,78)
10.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan/PPH P	2.100.000.000	1.351.473.100	(748.526.900)	35,64)
11.	Program Pengembangan Kelembagaan Usaha Perkebunan/PKU P	61.912.100	23.412.100	(38.500.000)	(62,18)
Jumlah		9.396.322.702	4.059.073.700	(5.337.249.002)	(56,80)

Sumber : *Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020*

Berdasarkan RKAP SKPD, hampir seluruh anggaran program di Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan saat 2020 mengalami perubahan. Salah satunya yaitu anggaran belanja program proteksi tanaman perkebunan yang mengalami perubahan anggaran sebesar 96,78 persen. Awalnya anggaran sebesar Rp 3.666.522.702 dianggarkan untuk 4 kegiatan antara lain: rehab gedung kantor UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan, rehab laboratorium produksi UPTD BPTP, pengadaan sarana dan prasarana laboratorium, dan pengawalan kegiatan dana alokasi khusus (DAK) penugasan. Kemudian anggaran

mengalami perubahan menjadi sebesar Rp 118.000.000 untuk pengawalan kegiatan dana alokasi khusus (DAK) penugasan. Dalam pelaksanaannya anggaran program proteksi tanaman perkebunan terdapat target realisasi anggaran yang telah direncanakan sebelumnya.

**Tabel 2. Realisasi Anggaran Program Proteksi Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020**

Nama Program	Anggaran (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)
Program Proteksi Tanaman Perkebunan	118.000.000	100	115.519.000

*Sumber : Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan APBD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020*

Berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan APBD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 alokasi anggaran untuk pelaksanaan program proteksi tanaman perkebunan sebesar Rp 118.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 115.519.000. Pada tahun 2020 program proteksi tanaman perkebunan terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain: rehab gedung kantor UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan, rehab laboratorium produksi UPTD BPTP, pengadaan sarana dan prasarana laboratorium, dan pengawalan kegiatan dana alokasi khusus (DAK) penugasan. Namun setelah terjadinya pandemi *covid-19*, terjadi perubahan anggaran yang pada mulanya sebesar Rp 3.666.522.702 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp 118.000.000 dengan hanya menyisakan satu kegiatan, yaitu pengawalan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) penugasan.

Dengan adanya perubahan anggaran belanja pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, maka penulis ingin melihat apakah perubahan anggaran yang terjadi berpengaruh pada kinerja anggaran program proteksi tanaman perkebunan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kinerja Anggaran Belanja Program Proteksi Tanaman Perkebunan Pada Masa *Covid-19* Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.”

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam pelaksanaan riset ini yaitu bagaimana Kinerja Anggaran Belanja Program Proteksi Tanaman Perkebunan Pada Masa *Covid-19* Di Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengamati kepada rumusan masalahnya tersebut, sehingga tujuan dari pelaksanaan riset ini yaitu supaya memahami Kinerja Anggaran Belanja Program Proteksi Tanaman Perkebunan Pada Masa *Covid-19* Di Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

### **1. Manfaat Teoritis**

Dari segi teoritis diharapkan riset ini mampu memberi kontribusi keilmuan serta pemikiran bagi Ilmu Administrasi Publik khususnya konsentrasi Keuangan Negara. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari penelitian yang dilakukan dengan menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.

### **2. Manfaat Praktis**

Dari segi praktis riset ini bisa dijadikan sebagai masukan maupun sumbangsih pemikiran untuk kemajuan dan perkembangan kepada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan juga riset ini diinginkan mampu memberi kontribusi pemikiran kepada riset mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asoka, S.E., M.SI., Rano. 2019. *Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Modal Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyah STIE Rahmaniyah Sekayu. Vol. 2, No. 2, Hal. 76-91
- Bastian, Indra. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Erlangga
- Baidhowi, Muhammad Luthfi. 2021. *Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang Tahun 2018-2020*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks
- Fadli, Dr. Rizal. 2021. *Coronavirus*. <https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus>. Diakses pada 24 Mei 2021
- Fahmi, Irham. 2020. *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta
- Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Karinda, Chrisman Youlli, Vantje Ilat, dan Lidia Mawikere. 2013. *Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara*.
- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020
- Laporan Kemajuan Fisik Dan Keuangan APBD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020
- Mahsun, Mohamad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Nariyah, Pandu. 2021. *Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Keatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Di Masa Covid-19*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
- Niansyah, Fitri Irka Wahyu dan Ali Tafriji Biswan. 2018. *Analisis Varians Anggaran Belanja Untuk Pengukuran Kinerja (Studi Terapan Pada KPP Badan dan Orang Asing)*. Indonesian Treasury Review. Vol.3, No. 4, Hal. 348-363
- Nordiawan, Deddi, dkk. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Pane, Dr. Merry Dame Crity. 2021. *Covid-19*. <https://www.alodokter.com/covid-19>. Diakses pada 24 Mei 2021
- Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara
- Purwadi, Yuni, Retno Murni Blitar. 2015. *Analisis Pengukuran Kinerja Anggaran Pada Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar*. Jurnal STIE Kesuma Negara Blitar. Vol.2, No.2, Hal.259-281
- Ramadani, Rani Febri, Elfreda Aplonia Lau, dan Suyatin. 2016. *Analisis Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda*. Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020
- Ruhmaini, Syukriy Abdullah, dan Darwanis. 2018. *Analisis Serapan Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah*. Jurnal Perspektif Ekonomi Darusslam FEB Unsyiah Banda Aceh. Vol. 4, No. 1 Hal. 31-43
- Sartika, Dewi. 2018. *Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Sigilipu, Steffi. 2013. *Pengaruh Penerapan Informasi Akuntansi Manajemen dan Sistem Pengukuran Kinerja Terhadap Kinerja Manajerial*. Jurnal Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol.1, No.3, Hal. 239-247
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tantri, Sakina Nusarifa dan Putri Irmawati. 2018. *Analisis Kinerja Anggaran Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2016*. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia. Vol.1, No.1, Hal. 27-37
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara